

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penelitian ini berusaha memberikan gambaran fenomena tentang sistim penyelenggaraan, permasalahan, dan upaya untuk mengatasi permasalahan yang terjadi seputar layanan pendidikan untuk ABK pada sekolah reguler dalam setting pendidikan inklusif di kota Singkawang yang dalam hal ini adalah SDN 27 Singkawang sebagai penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Kesimpulan berisikan pernyataan yang mengandung makna inti dari hasil temuan yang diketahui berdasarkan tiga fokus utama penelitian ini yakni: sistim penyelenggaraan layanan pendidikan bagi ABK di SDN 27 Singkawang selaku penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Singkawang, permasalahan yang dialami SDN 27 Singkawang dalam melaksanakan sistim penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Singkawang, dan upaya yang dilakukan oleh SDN 27 Singkawang selaku penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Singkawang dalam memecahkan permasalahan yang terjadi. Sedangkan rekomendasi dibuat dengan maksud untuk mengembangkan sistim penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Singkawang, Kalimantan Barat berdasarkan hasil kesimpulan yang telah uraikan sebelumnya. Setelah itu akan dibuat sebuah contoh program tahunan yang dapat digunakan berdasarkan hasil identifikasi temuan dari ketiga fokus penelitian yang disertakan dalam lampiran.

A. KESIMPULAN

1. Sistim penyelenggaraan layanan pendidikan bagi ABK di SDN 27 Singkawang selaku penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Singkawang mengungkap fakta tentang adanya ketidaksesuaian pemahaman pihak-pihak terkait mengenai definisi pendidikan inklusif dengan pelaksanaannya di lapangan. Hal tersebut terungkap ketika sekolah menerapkan sistim sekolah terpadu dalam melayani pendidikan bagi ABK, bukan sistim pendidikan inklusif sepenuhnya, meskipun salah satu syarat sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Singkawang telah terpenuhi karena melibatkan ABK dalam kegiatan operasionalnya. Ini terbukti dengan

adanya waktu khusus di luar PBM rutin untuk layanan pendidikan bagi ABK selama empat hari berturut-turut sehingga menyebabkan ABK dan Guru menghabiskan waktu lebih lama di sekolah. Berdasarkan perkembangan pengetahuan terkini, sekolah reguler yang menerima anak berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan belum dapat dikatakan melaksanakan pendidikan inklusif. Sebenarnya Pihak-pihak terkait yakni Kepala Sekolah, Guru Merangkap Manager Pendidikan Inklusif dan Pemerintah Kota yang diwakili Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Singkawang telah memiliki pengetahuan tentang definisi pendidikan inklusif karena definisi pendidikan inklusif merupakan hal penting yang harus dibahas untuk menentukan pemahaman terhadap prinsip dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Namun pihak Pemerintah Kota yang diwakili Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Singkawang tersebut menilai aspek pendukung di Kota Singkawang dalam mewujudkan aturan penyelenggaraan pendidikan inklusif secara optimal masih belum terpenuhi, disebabkan masih banyak sekolah umum / reguler di Kota Singkawang yang keberatan melayani pendidikan untuk ABK karena pengetahuan SDM mereka tentang layanan pendidikan bagi ABK masih terbatas dan banyaknya masyarakat Kota Singkawang yang masih beranggapan bahwa ABK hanya dapat bersekolah di SLB.

2. Permasalahan yang dialami SDN 27 Singkawang dalam melaksanakan sistim penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Singkawang di antaranya terkendala dengan pembiayaan / pendanaan di mana anggaran untuk optimalisasi penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Singkawang mengalami hambatan sehingga mengakibatkan pengadaan sarana dan prasarana bagi ABK ikut terhambat. Hal tersebut diakibatkan tumpang tindihnya kewenangan antara Pemerintah Kota Singkawang dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Singkawang dalam mekanisme penyaluran anggaran. Bahkan untuk tahun 2016 SDN 27 Singkawang tidak mendapatkan anggaran sama sekali untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Padahal pada tahun-tahun sebelum 2016 SDN 27 Singkawang selalu rutin

menerima. Ini menunjukkan implementasi pendidikan inklusif dapat beragam di setiap negara bahkan pada tingkat distrik dalam suatu negara seperti halnya yang terjadi di Kota Singkawang. Implementasi pendidikan inklusi dapat dipengaruhi faktor budaya dan kondisi lingkungan setempat, termasuk mengenai kebijakan anggaran. Kendala lainnya yaitu ketersediaan Guru Pendidikan Khusus yang sangat sulit untuk dipenuhi penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Singkawang karena harus melibatkan pembuat kebijakan lain dalam realisasinya. Salah satunya adalah dalam pengangkatan CPNS harus melibatkan BKD yang masih awam mengetahui penempatan Guru Pendidikan Khusus dapat dilakukan pada sekolah inklusif, sementara profesi ini termasuk langka di Kota Singkawang. Sekolah jika ingin mengangkat tenaga honor Guru Pendidikan Khusus terkendala dengan ketiadaan anggaran sehingga ketiadaan Guru Pendidikan Khusus pada SDN 27 Singkawang sebagai penyelenggara pendidikan inklusif menyebabkan tidak terprogramnya pola layanan khusus untuk pendidikan ABK. Untuk menyelenggarakan pendidikan yang baik, penyelenggaraan pendidikan inklusif harus memperhatikan faktor pendukung. Salah satunya berupa dukungan sistem yang menyebutkan bahwa pentingnya ketersediaan Guru Pendidikan Khusus ini. Permasalahan tidak kalah pentingnya yakni ketersediaan aksesibilitas untuk ABK dalam melaksanakan pendidikan inklusif yang mengungkap bahwa masih terdapat mindset atau persepsi yang belum tepat di antara stakeholder pembuat kebijakan di Kota Singkawang. Mereka belum sepenuhnya mengetahui bahwa layanan pendidikan ABK dapat dilakukan di sekolah reguler dan tidak hanya dilakukan di SLB. Diperkirakan hal tersebut terbentuk karena pengaruh pemahaman sebagian besar masyarakat Kota Singkawang yang beranggapan bahwa layanan pendidikan untuk ABK hanya bisa dilaksanakan di SLB. Hal ini dapat menghambat aksesibilitas ABK menikmati layanan pendidikan pada sekolah reguler / umum. Padahal aksesibilitas merupakan kewajiban sekolah penyelenggara dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif. Implementasi pendidikan inklusif akan dapat dilakukan dengan baik apabila

memegang teguh konsep-konsep utama pengimplementasian pendidikan inklusif.

3. Upaya yang dilakukan oleh SDN 27 Singkawang selaku penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Singkawang dalam memecahkan permasalahan yang terjadi di antaranya adalah dengan berupaya mendapatkan bantuan dari pemerintah. Namun belum ditemukannya upaya dari sekolah untuk mendapatkan bantuan dari lembaga non pemerintah. Padahal lembaga non pemerintah dapat menjadi mitra strategis dan merupakan salah satu opsi untuk dapat memberikan bantuan dalam rangka implementasi pendidikan inklusif berdasarkan konsep-konsep utama pendidikan inklusif. Konsep-konsep utama tersebut harus dipegang teguh oleh penyelenggara pendidikan inklusif. Sementara itu, SDN 27 Singkawang hanya dapat menyediakan sarana dan prasarana yang belum memadai dalam melayani ABK, sehingga dapat menghambat optimalisasi layanan pendidikan inklusif. Untuk menyelenggarakan pendidikan yang baik penyelenggaraan pendidikan inklusif harus memperhatikan salah satu faktor pendukungnya yaitu tersedianya layanan khusus dan adaptasi lingkungan fisik dan peralatan. Kemudian SDN 27 Singkawang dalam melayani pendidikan ABK masih belum optimal karena ketiadaan Guru Pendidikan Khusus, dimana keberadaan Guru Pendidikan Khusus mutlak diperlukan sekolah inklusif karena profesi tersebutlah yang dapat memahami dan melayani pendidikan untuk ABK secara optimal. Akibatnya pola layanan pendidikan khusus untuk ABK dengan melalui prosedur asesmen menjadi tidak berjalan dan terprogram dengan tepat. Selain itu, SDN 27 Singkawang berupaya mengajak orang tua siswa non ABK memiliki komitmen terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif. Meskipun terkesan diperoleh dengan paksaan karena adanya formulir dokumen komitmen yang musti ditandatangani seluruh orang tua siswa saat penerimaan siswa baru, namun ini merupakan bentuk tindakan sekolah dalam merubah pandangan orang tua siswa terhadap ABK dari paradigma pandangan medis menuju paradigma pandangan sosial. Sementara itu di lain pihak, upaya yang dilakukan stake holder pengambil kebijakan di Kota Singkawang dalam

mewujudkan dukungan penyelenggaraan pendidikan inklusif terkesan belum maksimal dan hanya sekedar membuat wacana serta hanya membuat rencana-rencana yang sifatnya masih mengkaji. Hal ini dibuktikan dengan hanya sebatas memberikan bantuan berupa rekomendasi pengajuan anggaran ke tingkat Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta tidak adanya jaminan pasti untuk penyediaan Guru Pendidikan Khusus untuk sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dalam hal ini SDN 27 Singkawang. Hal-hal tersebut muncul diperkirakan karena belum adanya tolok ukur yang jelas dari sekolah berkaitan dengan upaya yang diambil dalam mengatasi kendala penyelenggaraan pendidikan inklusif. Untuk mengetahui tolok ukur upaya yang diambil sekolah dalam mengatasi kendala penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat digunakan indeks inklusif. Di samping itu, Pemerintah Kota Singkawang belum pernah mengadakan kegiatan resmi yang dapat menghasilkan kekuatan hukum tetap dan mengikat, kecuali sebatas deklarasi Walikota Singkawang. Ini merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam rangka optimalisasi pendidikan inklusif di Kota Singkawang. Salah satu tantangan optimalisasi pendidikan inklusif di Kota Singkawang adalah merubah mindset negatif para stake holder pembuat kebijakan dan masyarakat di Kota Singkawang yang berasumsi bahwa ABK hanya bisa bersekolah di SLB. Padahal mindset tersebut adalah mindset zaman dahulu. Pada zaman sekarang ABK pun dapat bersekolah di sekolah reguler / umum sesuai bakat, minat dan potensinya. Tantangan pengembangan pendidikan inklusif di Indonesia termasuk di Kota Singkawang, salah satunya adalah merubah paradigma pendidikan segregasi menuju pada pendidikan inklusif.

B. REKOMENDASI

1. Terkait sistim penyelenggaraan layanan pendidikan bagi ABK di SDN 27 Singkawang selaku penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Singkawang yang mengungkap fakta tentang adanya ketidaksesuaian pemahaman pihak-pihak terkait mengenai definisi pendidikan inklusif dengan pelaksanaannya di lapangan, peneliti merekomendasikan kepada semua pihak-pihak yang

terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Singkawang, Kalimantan Barat untuk tidak sekedar hanya mengetahui definisi pendidikan inklusif, sementara implementasinya tidak sesuai dengan definisi pendidikan inklusif tersebut. Dalam hal ini diperlukan usaha yang lebih mendalam dalam memahami konsep pendidikan inklusif dengan merujuk pada berbagai referensi yang telah ada baik internasional maupun nasional mengenai aturan-aturan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Dengan demikian akan terjadi kesesuaian pemahaman antara definisi pendidikan inklusif dengan implementasinya di lapangan.

2. Mengenai permasalahan yang dialami SDN 27 Singkawang dalam melaksanakan sistim penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Singkawang, peneliti merekomendasikan seluruh stake holder yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Singkawang untuk duduk bersama mengidentifikasi seluruh kendala yang dialami penyelenggara pendidikan inklusif. Identifikasi seluruh kendala yang dialami penyelenggara pendidikan inklusif penting dilakukan guna menghindari perbedaan kebijakan di antara para stake holder tersebut dalam memecahkan permasalahan yang ada terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Singkawang.
3. Sedangkan dalam hal upaya yang dilakukan oleh SDN 27 Singkawang selaku penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Singkawang dalam memecahkan permasalahan yang terjadi, salah satu di antaranya mengungkap belum ditemukannya upaya dari sekolah untuk mendapatkan bantuan dari lembaga non pemerintah. Terkait hal ini, peneliti merekomendasikan kepada SDN 27 Singkawang tidak hanya mengandalkan bantuan (anggaran / teknis) dari pemerintah. Diperlukan kreativitas untuk memperoleh bantuan lembaga non pemerintah guna penyelenggaraan pendidikan inklusif. Informasi tersebut bisa didapatkan melalui internet. Peneliti merekomendasikan juga kepada SDN 27 Singkawang agar mengusahakan keberadaan Guru Pendidikan Khusus dan penyediaan sarana prasarana yang aksesibel untuk ABK jika bantuan berupa anggaran sudah tersedia. Hal ini penting dilakukan agar usaha untuk memenuhi kebutuhan

pendidikan ABK pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dapat lebih optimal. Di lain pihak peneliti merekomendasikan kepada para pengambil kebijakan di Kota Singkawang agar kebijakan yang diambil diupayakan dengan serius berdasarkan hasil identifikasi kendala yang dialami oleh sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Berkaitan hal tersebut, peneliti telah membuat contoh program berupa program tahunan yang bisa coba digunakan oleh pihak-pihak terkait guna memaksimalkan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Singkawang.

4. Penelitian ini hanya sebatas mengungkap hal-hal yang menjadi masalah dalam layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus pada sekolah reguler penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Singkawang dan membuat program untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, namun peneliti belum sempat mengujicobakan program tersebut sebagai bentuk pengembangannya. Oleh karena itu peneliti merekomendasikan kepada peneliti berikutnya untuk dapat melakukan penelitian yang sifatnya ujicoba program tersebut kepada pihak-pihak terkait dan mengembangkannya jika diperoleh hasil yang belum maksimal dalam rangka peningkatan sistim layanan pendidikan inklusif khususnya di Kota Singkawang - Kalimantan Barat.